Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
https://ejournal.merivamedia.com/index.php/meriva
Volume: 01, Nomor: 03, Juli, 2025
Halaman : 141 - 167

PERBANDINGAN KURIKULUM DI INDONESIA: KURIKULUM 2013 (K13) DENGAN KURIKULUM MERDEKA

Hamdan Syukril Imama[1], Ikhwani Fadhilah[2], Ilham Maulana An-Nafi'i[3] ,Mambaul Ngadimah, M,Ag[4]
[123]UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo,
[1] hamdansyukril19@gmail.com,[2] ikhwanifadlilah@gmail.com,
[3]ilhamanafii@gmail.com, [4]mambaul@iainponorogo.ac.id.

Received: 04-04-2025 Revised: 05-05-2025 Approved: 10-06-2025
*) Corresponding Author
Copyright ©2025 Authors

Abstract

This article compares Indonesia's 2013 Curriculum (K13) with the Merdeka Curriculum, focusing on their structural and pedagogical differences. K13 is competency-based, emphasizing the development of spiritual, social, knowledge, and skills competencies through a scientific approach. It utilizes a rigid weekly schedule and standardized assessments. In contrast, the Merdeka Curriculum offers flexibility, allowing schools to adjust learning to local contexts and student needs. It emphasizes the development of the Pancasila Student Profile through project-based learning and authentic assessments. The curriculum is organized into phases, permitting personalized learning paths and integration of local content. Assessment is holistic and continuous, focusing on individual progress rather than standardized testing. This comparative analysis highlights the shift from a structured, content-driven approach in K13 to a more flexible, learner-centered model in the Merdeka Curriculum. The findings suggest that the Merdeka Curriculum aligns more closely with contemporary educational philosophies that prioritize critical thinking, creativity, and character development. The study concludes that the Merdeka Curriculum represents a significant step toward a more responsive and inclusive education system in Indonesia.

Keywords: *: Curriculum 2013, independent curriculum, comparis*

Abstrak

Artikel ini membahas perbandingan antara Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka di Indonesia, dengan menyoroti perbedaan dalam struktur dan pendekatan pedagogis. K13 berfokus pada pengembangan kompetensi melalui pendekatan ilmiah, dengan penekanan pada kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum ini menggunakan jadwal mingguan yang tetap dan penilaian standar. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Kurikulum ini menekankan pengembangan Profil Pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik. Struktur kurikulum disusun dalam beberapa fase, memungkinkan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi dan integrasi konten lokal. Penilaian bersifat holistik dan berkelanjutan, dengan fokus pada kemajuan individu daripada pengujian standar. Analisis ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan terstruktur dan berbasis konten di K13 menuju model yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik dalam Kurikulum Merdeka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka lebih sesuai dengan filosofi pendidikan kontemporer yang mengutamakan pemikiran kritis, kreativitas, dan pengembangan karakter. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan langkah penting menuju sistem pendidikan yang lebih responsif dan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: *Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Perbandingan.*

A. Pendahuluan

Bagian terpenting dari pendidikan adalah kurikulum. Pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia, pendidikan terus berkembang dan maju. Kurikulum sekolah secara resmi dimulai sejak penjajahan Belanda. Kurikulum adalah sarana dan tujuan pendidikan. Kurikulum memberikan dasar pendidikan. Kurikulum yang digunakan oleh negara menentukan kehidupan akademiknya. [1]

Kurikulum memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Menurut Oemar Hamalik, kurikulum memiliki fungsi konservatif, yaitu sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya masa lampau yang masih relevan bagi generasi masa kini. Namun demikian, kurikulum juga harus bersifat progresif, mampu menciptakan inovasi demi menjawab kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan mendatang.[2]

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan sikap positif, pengetahuan, serta keterampilan siswa. Sementara itu, Kurikulum Merdeka menyediakan beragam pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan di setiap jenjang kelas. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk memahami materi secara mendalam dan mengasah kemampuan mereka secara bertahap. Dalam penerapannya, guru diberikan keleluasaan untuk memilih metode pembelajaran yang bervariasi guna menyesuaikan dengan

[1] Nova Yunita Sari, Dearlina Sinaga, dan Juliper Nainggolan, "PERKEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA DI INDONESIA," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Volume 7 Nomor 1 (2024): 2199.

[2] Aulia Rofi'atul Khusna, Anis Sukmawati, dan Muhammad Nuril Huda, "ANALISIS PERBANDINGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM SUDUT PANDANG FILSAFAT PENDIDIKAN BARAT DAN ISLAM," *Annual Islamic Conference for Learning and Management*, Desember 2024, 136–37.

kebutuhan dan minat peserta didik. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya dan ritme masing-masing, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran. Dengan strategi ini, diharapkan siswa mampu mengoptimalkan potensinya dan mengembangkan sikap serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini..[3]

Pentingnya topik mengenai perbandingan kurikulum diindonesia. Dalam artikel ini, peneliti akan membahas beberapa pertanyaan mengenai kurikulum yang ada diindonesia: a) Sejarah kurikulum yang ada di Indonesia, b) Aspek-aspek Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka c) Kelebihan dan kekurangan pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, d) Perbandingan Aspek Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mendalami secara lebih rinci masalah yang akan diteliti. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *library researh* atau kajian pustaka, di mana peneliti menggunakan berbagai sumber tulisan, baik dari buku, jurnal, situs web, maupun berita yang relevan sebagai referensi. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan. Melalui hasil pengumpulan informasi dari kajian perpustakaan, peneliti merangkum dan mengekstraksi inti dari diskusi yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menarik konsep-konsep yang berhubungan dengan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Teknik analisis data yang digunakan mencakup beberapa langkah, antara lain pengumpulan data yang relevan dengan topik-topik yang sejalan dengan artikel ini. Data yang dikumpulkan kemudian direduksi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data yang telah disusun akan disajikan (*display* data), dan pada akhirnya, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.[4]

[3] Muh. Nana Supriatna, Istiqomah Eka Diyanti, dan Ratna Sari Dewi, "Analisis Perbandingan Kurikulum KTSP, K13 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar," *Journal on Education* Volume 06, No. 01 (Desember 2023): 9170.

[4] Muhammad Rifa'i Subhi Nora Karima Saffana, "Degradasi Moral Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Muaddib* 2, No.1 (Desember 2023): 67.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Sejarah Kurikulum di Indonesia

a. Kurikulum Era Penjajahan

1) Masa Hindu Budha

pendidikan pada masa hindu budha adalah pendidikan yang sangat kaya akan karakteristik dan juga keunikan, baik itu dari segi sistem pendidikannya, ada yang dari kepercayaan yang mereka anut sehingga mengakibatkan proses terjadinya pendidikan yang dilakukan oleh para biksu tidak hanya fokus ke dalam 1 pengajaran saja tetapi bisa bercabang, seperti pendidikan yang dilakukan di vihara, mereka melatih muridnya untuk mengasah keterampilan dan karakter spiritual para murid. Sistem pendidikan yang berbeda juga diberlakukan oleh kalangan tertentu seperti kaum bangsawan atau brahmana, pendidikan yang didapatkan juga pastinya berbeda dengan pendidikan yang didapatkan oleh murid pada umumnya, pendidikan ini biasanya didapatkan oleh para bangsawan elit muda yang sudah diajarkan hukum dan juga politik sejak kecil, yang gunanya untuk memimpin kerajaan nantinya. Bahasa yang digunakan juga merupakan cerminan dari pengaruh ajaran hindu budha, bahasa sanksekerta yang dulu dijadikan bahasa pokok masyarakat indonesia untuk lebih mendekatkan diri kepada para biksu dan cendikiawan pada saat pembelajaran, dan juga bahasa ini dianggap sebagai tanda kecerdasan seorang murid jika berhasil menyempurnakan pengucapannya dan menaikan statusnya menjadi lebih tinggi.

Disisi pendidikan formalnya yang diajarkan oleh cendikiawan, ada pendidikan tambahan diluar pengajaran oleh biksu, yaitu pendidikan lisan, sikap dan seni pertunjukan. Pendidkan lisan dan sikap biasanya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, pendidikan ini orang tua pada masa itu lakukan tujuannya tidak jauh berbeda seperti zaman ini yaitu untuk menanamkan sifat menghormati dan menjaga ucapan jikalau itu tidak diperlukan [5]

2) Masa Belanda

[5] Handika Anggit Pramudya dan Afifah Aura Felisha, "PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA HINDU BUDHA" 3, no. 1 (2024): 4.

Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan sangat memprioritaskan anak-anak keturunan Belanda untuk memperoleh pendidikan tinggi. Rakyat Indonesia, khususnya dari kalangan biasa, tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tersebut. Hanya segelintir orang pribumi dari kalangan bangsawan atau keluarga kaya yang bisa bersekolah di institusi pendidikan milik Belanda, sebab sekolah-sekolah itu tergolong mahal dan bersifat eksklusif. Selain itu, banyak keluarga Belanda menolak jika anak-anak mereka harus bersekolah bersama anak pribumi yang dianggap miskin dan kurang berpendidikan. Bahkan, demi menghindari pergaulan dengan anak-anak pribumi, sebagian orang tua Belanda lebih memilih mengirim anak-anak mereka untuk belajar langsung di negeri Belanda. Meski demikian, pendidikan untuk masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya diabaikan. Beberapa tokoh pemerintahan kolonial seperti Daendels dan Van Der Capellen pernah mendorong pelaksanaan pendidikan bagi rakyat pribumi, meskipun hanya sedikit sekolah yang berhasil didirikan—sekitar tiga sekolah saja—karena biaya pendirian sekolah dianggap membebani pemerintah kolonial, apalagi saat itu kondisi keuangan Belanda sedang sulit. Akhirnya, pengelolaan sekolah pun diserahkan kepada pihak swasta.

Namun karena Belanda juga memerlukan tenaga kerja lokal yang terdidik, perlahan mulai muncul berbagai jenis sekolah seperti sekolah desa, HIS *(Hollandsch-Inlandsche School)*, dan sekolah raja. Walau demikian, tidak semua anak dari kalangan menengah ke bawah dapat menikmati fasilitas pendidikan tersebut. Di sisi lain, pendidikan bagi anak-anak bangsawan pribumi lebih terjamin, bahkan tak sedikit dari mereka yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi ternama di Eropa. Secara keseluruhan, pendidikan di era kolonial memang berorientasi pada kepentingan penjajah, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan profesional. Meskipun begitu, dari sejarah pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan bangsa Indonesia sejatinya tidak kalah dengan bangsa penjajah. Hal ini dibuktikan dengan munculnya banyak tokoh bangsa yang terdidik secara Barat, yang kemudian mendirikan

organisasi sosial, politik, dan kebudayaan modern baik melalui jalur kooperatif maupun non-kooperatif.[6]

3) Masa Jepang

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan pendidikan yang dirancang untuk mendukung tujuan Perang Asia Timur Raya. Kurikulum disusun agar sesuai dengan kepentingan militer Jepang. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, sistem dualisme dan konkordansi dihapuskan, dan akses pendidikan menjadi lebih terbuka bagi anak-anak pribumi. Semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, diberikan peluang yang setara dalam memperoleh pendidikan.

Jepang mendirikan sekolah-sekolah rakyat yang disebut Kokumin Gakko sebagai jenjang pendidikan dasar. Selain itu, terdapat pula sekolah menengah dan sekolah kejuruan yang ditujukan untuk melatih tenaga pendidik. Materi pelajaran pada masa ini mencakup Sejarah, Geografi, Bahasa Indonesia (Melayu), Adat Istiadat, Bahasa Jepang, Ideologi Jepang, serta unsur-unsur budaya Jepang.[7]

b. Kurikulum Pendidikan Masa Islam

Pendidikan Islam telah berlangsung selama lebih dari 14 abad, dengan tujuan utama menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik serta membekali mereka dengan ilmu-ilmu keislaman. Tujuannya adalah agar mereka mampu menjalankan syariat Islam dengan benar berdasarkan pemahaman yang tepat. Masuknya Islam ke Indonesia terjadi melalui berbagai teori, namun kesepakatan umum menyebutkan bahwa prosesnya berlangsung damai, menyebar dari kalangan masyarakat bawah menuju golongan bangsawan dan penguasa (bottom-up). Pada mulanya, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal melalui hubungan langsung antara dai dan masyarakat, yang kemudian membentuk komunitas Muslim. Seiring terbentuknya masyarakat tersebut, kegiatan pendidikan Islam mulai dilakukan secara lebih terstruktur di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan surau dalam bentuk pendidikan nonformal.

[6] Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani dan Yasinta Putri Kristanti, "PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ZAMAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA ABAD 19-20," *Jurnal Artefak*, 2020, 105.

[7] Sholeha Elis Setiawati, "PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945," *jurnal Swarnadwipa* Volume 5, Nomor 3 (2019): 135–36.

Dengan berkembangnya agama Islam, sistem pendidikan pun mulai dijalankan secara formal melalui lembaga seperti pesantren, dayah, maktab, serta kemudian madrasah dan perguruan tinggi Islam.

Isi pembelajaran dalam pendidikan Islam sejak awal berfokus pada pengajaran Al-Qur'an dan kitab-kitab karya ulama. Al-Qur'an diajarkan di langgar atau mushola yang juga berfungsi sebagai tempat ibadah. Dalam pengajian ini, peserta didik diajarkan membaca huruf hijaiyah, membaca Al-Qur'an, tata cara beribadah (seperti wudhu dan shalat), serta pendidikan akidah dan akhlak. Setelah menyelesaikan pembelajaran Al-Qur'an, murid melanjutkan ke tingkat pengajian kitab, yang umumnya dilakukan di pesantren.

Sistem pendidikan pesantren memiliki kemiripan dengan sistem asrama pada masa Hindu-Buddha, di mana hubungan antara guru dan murid sangat dekat. Kitab-kitab yang diajarkan biasanya merupakan karya ulama klasik, dengan metode pengajaran seperti bandungan (berkelompok) dan sorogan (individu). Selain kitab, bahasa Arab juga menjadi bagian penting dari kurikulum. Pesantren tidak menerapkan sistem waktu yang kaku; seorang santri akan melanjutkan ke jenjang berikutnya setelah menuntaskan satu kitab. Kehidupan pesantren yang khas ini menjadi identitas kuat pendidikan Islam di Indonesia, yang mampu bertahan hingga kini dengan berpegang pada nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi.[8]

c. Kurikulum Era Kemerdekaan

1) Masa Orde Lama

Kurikulum sarjana ini dibuat hanya dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya, kurikulum ini disebut *Leerplan* (rencana pelajaran) daripada *curriculum dalam bahasa Inggris*. Karena agresi militer Belanda dan sekutunya pada saat itu merusak Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar pendidikan. Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana dan hanya mencakup dua hal utama: daftar mata pelajaran dan jam pelajaran dan garis besar instruksi, dengan menekankan kemerdekaan, kemandirian, dan kesetaraan manusia Indonesia. Akibatnya, itu bukan tentang pendidikan

[8] Humaira Dzakiyya Azizah, Bihar Hadil Alam, dan Andia Nursyaban, "Sejarah Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Prasejarah Hingga Awal Kemerdekaan," t.t., 220.

pikiran; sebaliknya, itu tentang sifat, kesadaran sosial, dan kesadaran bangsa.[9].

Setelah Rencana Pelajaran 1947, yang kemudian dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952, kurikulum Indonesia diperbarui pada tahun 1952. Kursi ini membentuk dasar pendidikan nasional. Rencana pelajaran harus mencakup materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari adalah salah satu elemen yang paling menonjol dari Kurikulum 1952. Selanjutnya, Rencana Pendidikan 1964, atau Kurikulum 1964, dimulai pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral adalah tujuan dari program pendidikan ini (Pancawardhana). Setiap topik memiliki lima bidang studi: moral, kecerdasan, dan emosional.[10].

Kurikulum 1964 disusun menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kurikulum ini, yang dikenal juga sebagai Rencana Pendidikan 1964, merupakan pembaruan dari kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran dikelompokkan ke dalam lima bidang utama: moral, intelektual, seni atau rasionalitas, keterampilan, serta kesehatan jasmani. Pada jenjang pendidikan dasar, perhatian utama diberikan pada pengetahuan dan aktivitas yang bersifat praktis dan berguna. Pemerintah saat itu mendorong agar masyarakat memperoleh pengetahuan akademik sebanyak-banyaknya, yang menjadi ciri khas dari kurikulum ini. Karena itu, inti dari program pendidikan ini adalah Panca Wardana, yang bertujuan mengembangkan kemampuan berkarya dan membentuk karakter moral

2) Masa Orde Baru

Kurikulum 1968, yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1964, muncul lagi pada tahun 1968. Kurikulum 1968 mengubah strukturnya dari Panca Wardana ke pembinaan jiwa Pancasila sebagai pengetahuan dasar dan keahlian khusus. Pada dasarnya, pelajaran ini berfungsi sebagai dasar untuk menerapkan UUD 1945 secara menyeluruh. Kursi ini dirancang untuk

[9] Desi Marzelni, "Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia," 2025, 115.

[10] Fitri Wahyuni, "KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia)" Vol. 10 No. 2, (Juli 2015): 235.

menumbuhkan siswa yang Pancasilais, kuat, sehat jasmani dan rohani, cerdas, berbudi pekerti, dan beragama.[11]

Setelah Kurikulum 1968, Kurikulum 1975. Kurikulum tahun 1975 menetapkan bahwa tujuan pendidikan harus efektif dan efisien. Pelaksana lapangan banyak mengkritik kurikulum 1975. Guru memiliki banyak waktu untuk menulis tujuan kegiatan pembelajaran. Sebagai pengganti kurikulum 1968, kurikulum 1975 menggunakan prinsip-prinsip berikut: pendidikan berorientasi pada tujuan, menggunakan pendekatan integratif, menekankan penggunaan sumber daya dan waktu yang efisien, dan penerapan pendekatan sistem instruksional yang disebut PPSI. Tujuan utama dari program ini adalah perubahan tingkah laku siswa. Sistem Penilaian Pada akhir setiap pelajaran atau satuan pelajaran. Ini menunjukkan perbedaan antara sistem penilaian dalam kurikulum sebelumnya dan yang digunakan pada tahun 1975. Pada akhir setiap satuan pembelajaran, guru diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri.

Kurikulum 1984, juga dikenal sebagai Kurikulum CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), adalah penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Meski telah menggunakan pendekatan proses, komponen tujuan tetap penting dalam hal ini. Kursi ini sering disebut sebagai "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Siswa adalah subjek belajarnya. Karena siswa selalu aktif dalam pembelajaran, model ini disebut pembelajaran aktif. dari melihat, mengelompokkan, berbicara. Namun, banyak sekolah tidak memaksimalkan, sehingga siswa hanya gaduh dan tidak melakukan pelajaran dengan baik.

Kurikulum tahun 1994 menggabungkan program tahun 1975 dan 1984. Itu dibuat sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989. Tidak seperti sistem semester, kurikulum ini menggunakan sistem catur wulan. Sistem caturwulan, yang membaginya menjadi tiga tahap setiap tahun, diharapkan akan memberi siswa kesempatan untuk mempelajari sejumlah besar materi pelajaran. Tujuan dan prosedur pengajaran kurikulum ini tidak cukup padu. Fokusnya lebih pada materi pelajaran dan kemampuan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

[11] Ahmad Saifudin, "SEJARAH DAN PARADIGMA KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA" Vol. 02 Nomor 02 (2022): 6–7.

Pada tahun 1999, kurikulum dilengkapi dengan penambahan mata pelajaran yakni materi muatan lokal dan nasional. Materi muatan lokal disesuaikan dengan bahasa, seni, dan keterampilan lokal. Kurikulum 1994 akhirnya menjadi kurikulum yang sangat padat dengan hasil yang kurang maksimal [12]

3) Masa Reformasi

Setelah satu dekade Kurikulum 1994 diterapkan, pada tahun 2004 kurikulum tersebut digantikan oleh Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Melalui penerapan KBK, sekolah memperoleh keleluasaan untuk merancang dan mengembangkan bagian-bagian kurikulum yang sebelumnya lebih terfokus pada isi materi. Perubahan ini menggeser pendekatan dari sekadar penguasaan materi ke pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di tiap sekolah. Pendidikan berbasis kompetensi bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditentukan. Ini menegaskan bahwa pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan individu agar mampu menerapkan keterampilan tertentu dalam kehidupan nyata. Fokus utama KBK adalah pada hasil belajar serta dampak positif yang diharapkan dari berbagai pengalaman belajar yang kaya, bermakna, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa.

Oleh sebab itu, perancangan kurikulum perlu mempertimbangkan bahwa pendidikan merupakan proses untuk membekali siswa dengan keterampilan aplikatif. Kurikulum ini menekankan pencapaian kompetensi secara personal, serta pemilihan dan pengembangan keterampilan yang relevan baik bagi peserta didik maupun tenaga pengajar. Selain perubahan pendekatan kurikulum, pada tahun yang sama pemerintah juga melakukan penyesuaian nomenklatur jenjang pendidikan. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) diubah menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) kembali dinamakan Sekolah Menengah Atas (SMA). Penyesuaian ini diharapkan dapat memperkuat relevansi serta efektivitas sistem pendidikan nasional.

KTSP diciptakan dengan kesadaran bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kedua pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu,

[12] Sri Deni, "Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia" Vol: 1, No 1 (2023): 5–6.

berdasarkan pola atau model kurikulum pengembangannya, KTSP merupakan model kurikulum yang desentralisasi. KTSP dan KBK yang disempurnakan adalah istilah yang sering digunakan. Kurikulum KTSP dianggap tidak lengkap dan memiliki banyak kekurangan, terutama di era komputer dan internet sekarang, di mana teknologi tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Oleh karena itu, kurikulum KTSP harus segera disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada tahun 2013. Kemajuan teknologi adalah salah satu alasan yang mungkin untuk memperbaiki kurikulum. Kurikulum KTSP baru dibuat setelah Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diterapkan. Tidak ada hubungannya dengan kurikulum sebelumnya yang telah berubah atau digantikan. Kurikulum 2013 meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dengan menekankan pendidikan karakter untuk menciptakan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar dengan tujuan menciptakan budi pekerti yang baik dan siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk setiap satuan pendidikan.[13]

Untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang sudah lama berlangsung, Kemendikbudristek memulai Kurikulum Merdeka pada Februari 2022. Kurikulum ini dirancang agar minat dan bakat siswa berkembang secepat mungkin. untuk memberikan waktu kepada siswa untuk memahami ide-ide tersebut dan menguatkan kemampuan mereka. Akibatnya, setiap aspek sistem pendidikan mengalami transformasi yang signifikan.[14] Kurikulum belajar bebas memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan evaluasi sumatif dan formatif, nilai yang diberikan kepada siswa lebih memperhatikan bagaimana mereka melakukan pembelajaran. Sekolah harus mencoba hal-hal baru untuk membantu siswa belajar, seperti proyektor sebagai alat pembelajaran. Untuk mendorong siswa untuk menjadi inovatif, guru harus berinovasi dalam pembelajaran mereka.

[13] Farah Dina, "SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA SAAT INI" Vol. VIII No.1 (2019): 58–59.

[14] Marzelni, "Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia," 120.

Kurikulum merdeka menekankan keahlian dalam menggunakan teknologi agar pembelajaran tidak terbatas pada metode ceramah.[15]

2. Aspek-aspek pada Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka

a. Kurikulum 2013

1) Struktur Kurikulum 2013

Menurut At-Taubany dan Hadi, struktur kurikulum merupakan representasi penerapan prinsip-prinsip kurikulum yang berkaitan dengan peran peserta didik dalam menuntaskan proses pembelajaran pada suatu tingkat atau jenjang pendidikan. Struktur ini juga menggambarkan bagaimana pengorganisasian isi materi serta pengaturan beban belajar diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran. Adapun struktur Kurikulum 2013 adalah:

- **Kompetensi Inti**

Kompetensi inti dirancang agar sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik. Pada tingkat kelas tertentu, kompetensi inti juga berperan dalam memastikan kesinambungan vertikal antara berbagai kompetensi dasar yang diajarkan di jenjang pendidikan yang berbeda Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

a) Kompetensi inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual.
b) Kompetensi inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial.
c) Kompetensi inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan.
d) Kompetensi inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

- **Kompetensi Dasar**

Mata pelajaran ini terbagi dalam dua kelompok kurikuler. Kelompok umum A ditujukan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai landasan dalam memperkuat kapasitas mereka untuk berperan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Sementara itu, Kelompok umum B berfokus pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan

[15] Amrazi Zakso, "IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI INDONESIA" Volume 13 Number 2 (2022): 921.

keterampilan yang berhubungan dengan lingkungan sosial, budaya, dan seni.

- **Mata Pelajaran**

Mata pelajaran ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok umum A merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai landasan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, kelompok umum B adalah program kurikuler yang difokuskan pada pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan lingkungan sosial, budaya, dan seni.

- **Muatan Pembelajaran**

Pelajaran dalam kurikulum 2013 menyatu menjadi tematik integratif, yaitu penggabungan mata pelajaran berdasarkan tema-tema tertentu. Penggabungan mata pelajaran tersebut disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013.

- **Beban Belajar**

Beban belajar merupakan keseluruhan aktivitas yang wajib diikuti oleh peserta didik dalam kurun waktu satu minggu, satu semester, maupun satu tahun pembelajaran. Beban belajar ini mencakup seluruh materi dan pengalaman belajar yang harus dijalani oleh peserta didik selama periode tersebut.[16]

2) Sistem Pembelajaran Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 memberikan penekanan pada pendekatan ilmiah (*scientific approach*), yang pada dasarnya berfokus pada proses perolehan pengetahuan berbasis inquiry serta internalisasi pengetahuan secara mendalam, bermakna, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penerapan Kurikulum 2013, aspek afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Perangkat pembelajaran dalam Kurikulum 2013 yang disusun oleh

[16] A. Suradi dkk., "KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM 2013 MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)," *AL IBTIDAIYAH: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* Volume 4 Nomor 1 (Januari 2023): 15–20.

guru mengacu pada silabus yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Implementasi pendekatan ilmiah serta pembelajaran tematik integratif direalisasikan melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)..[17]

3) Perangkat Kurikulum 2013

Merupakan alat pembelajaran yang digunakan pendidik pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu, merupakan perencanaan pembelajaran dengan berbagai kelengkapannya. Perangkat pembelajaran kurikulum ini menjadi acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga pendidik harus mempersiapkan peralatan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Berikut perangkat kurikulum 2013 (K13); adanya Alur Perencanaan Perangkat Pembelajaran. Pentingnya rancangan membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Program Semester, Perencanaan Mingguan, dan Perencanaan Harian:

- ***Program Tahunan (PROTA)***

Rancangan menentukan alokasi waktu selama dua semester pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya perancangan program tahunan, dengan harapan dapat mencapai perkembangan dan indikator ketercapaian peserta didik.

- ***Program Semester (PROSEM)***

Uraian berdasarkan rancangan program tahunan. PROSEM yaitu rancangan pembelajaran yang terdiri dari tema selama satu semester serta alokasi waktu yang ditentukan setiap tema. Menyusun rangkaian pembelajaran dikembangkan berdasarkan acuan materi yang terdapat pada KD yang kemudian dirancang dalam pembuatan RPPM.

- ***Kompetensi yang Dicapai melalui Pembelajaran***

Kurikulum ini juga disebut berbasis kompetensi. Ketercapaian kompetensi meliputi spiritual, sosial, pengetahuan serta keterampilan perkembangan komprehensif. Berikut "Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)" antara lain: KI adalah penjabaran dari

[17] Dewi Tryanasari Ibadullah Malawi dan Edy Riyanto, "PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASA," *ILMU PENDIDIKAN* 2, No.1 (Juni 2017): 2.

ketercapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), KD adalah tingkatan kemampuan berisi muatan dan tema pembelajaran maupun pengalaman pembelajaran berpedoman pada (KI).

- ***Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)***

  RPPM ini disusun sebagai pedoman rancangan pembelajaran dengan alokasi waktu seminggu. Diantaranya, identitas program dan indikator RPPM. RPPM berisi kegiatan yang disesuaikan (KD) yang terdapat pada PROSEM.

- ***Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)***

  Berisi rangkaian perencanaan pembelajaran berdasarkan acuan dari RPPM yang dilakukan selama satu hari. Pendekatan saintifik ini digunakan dalam pengembangan RPPH. Pendidik wajib menyusun RPPH sebelum masuk ke ruang kelas. RPPH tidak hanya membantu pendidik dalam perencanaan untuk menetapkan kebutuhan, serta teknik pembelajaran dalam pengelolaan waktu. [18]

4) Standar Kelulusan Kurikulum 2013

   Standar kompetensi lulusan mulai dari jenjang SD/MI/SDLB/Paket A hingga SMK/MAK menitikberatkan pada pengembangan nilai-nilai keagamaan, disiplin sosial, serta kemampuan berpikir kritis. Dimulai dari pemahaman dasar tentang agama di tingkat SD hingga pengintegrasian nilai-nilai agama dan kedisiplinan sosial di tingkat SMA, para lulusan diharapkan mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif sesuai dengan arahan dari tenaga pendidik. Secara keseluruhan, standar kompetensi ini mencerminkan upaya membentuk individu yang berakhlak mulia, taat pada norma sosial, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan inovatif.[19]

5) Model Pembelajaran Pada Kurikulum 2013

   Kurikulum 2013 merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan saat

[18] Utami Kumala Dewi, David Triatna, dan Sukiman, "KOMPARASI PERANGKAT PEMBELAJARAN KURIKULUM (2013 DAN MERDEKA) ANAK USIA DINI," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 8 (2024): 55–59.

[19] Ahmad Suradi dkk., "STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN KOMPETENSI INTI PADA KURIKULUM 2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH," *Awwaliyah: Jurnal PGMI* Volume 5 Nomor 2 (2020): 144.

ini sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan yang dipenuhi oleh persaingan global. Kebijakan yang diterapkan mencakup pengaturan mata pelajaran, penetapan tujuan pembelajaran, serta strategi dan model pembelajaran. Model pembelajaran sendiri berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan pendidikan, baik bagi peserta didik maupun pendidik. Dalam Kurikulum 2013, sejumlah model pembelajaran yang direkomendasikan meliputi model discovery/inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, serta model pembelajaran kooperatif.[20]

b. Kurikulum Merdeka

1) Struktur Kurikulum Merdeka

Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, struktur kurikulum terdiri atas kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta aktivitas ekstrakurikuler. Alokasi waktu pelajaran disusun untuk keseluruhan satu tahun dan disertai dengan rekomendasi pembagian waktu dalam format reguler atau mingguan. Secara umum, menurut informasi dari laman Kemendikbudristek, total jam pelajaran tidak mengalami perubahan. Kegiatan pembelajaran mencakup pembelajaran intrakurikuler serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana peserta didik dilatih untuk mengidentifikasi isu nyata di lingkungan sekitar dan bekerja sama mencari solusi. Oleh sebab itu, pemberian alokasi waktu khusus sangat penting agar proyek ini dapat terlaksana secara efektif. Sementara itu, untuk muatan lokal, satuan pendidikan atau pemerintah daerah memiliki kebebasan menambah konten sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Pengelolaan muatan lokal bersifat fleksibel dan dapat dilakukan melalui tiga cara: mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain, mengaitkannya dengan tema proyek penguatan profil

[20] Akhmad Yazidi, "MEMAHAMI MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DALAM KURIKULUM 2013 (THE UNDERSTANDING OF MODEL OF TEACHING IN CURRICULUM 2013)," t.t., 94.

Pancasila, atau menyelenggarakan mata pelajaran khusus muatan lokal sebagai bagian dari program intrakurikuler.[21]

Kurikulum dapat didefinisikan sebagai dokumen yang berisi rencana yang terstruktur yang mencakup tujuan yang ingin dicapai, materi yang harus dipelajari, dan berbagai pengalaman belajar yang harus dijalani oleh siswa. Kurikulum juga mencakup teknik pengembangan dan evaluasi yang dirancang untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut tercapai, serta bagaimana dokumen yang telah dirancang diimplementasikan. Kurikulum ini mencakup kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terjadi selama proses pembelajaran dan memiliki hubungan langsung dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum. Namun, seringkali dianggap kurang efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa. Misalnya, sangat sering terjadi bahwa satu mata pelajaran hanya diberikan satu, dua, atau bahkan tiga jam pelajaran setiap minggu. Akibatnya, perlu ada program pendampingan untuk memaksimalkan potensi peserta didik. Diharapkan bahwa kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan siswa dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Kurikulum menjadi alat yang berguna untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa lebih dari sekedar dokumen.[22]

2) Sistem Pembelajaran Merdeka

Dalam Kurikulum Merdeka, Capaian Pembelajaran (CP) adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir setiap fase. CP bersifat umum, sehingga memberikan kesempatan bagi setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang efektif sesuai dengan konteks mereka, yang sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi masing-masing satuan pendidikan serta memenuhi kebutuhan

[21] Ummi Salamah, Yuni Listiyani, dan Mustafiyanti Mustafiyanti, "Analisis Konsep Dan Struktur Kurikulum Merdeka Dan Merdeka Belajar," *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* vol.4 No.2 (2024): 127–28.

[22] Khusna Farida Shilviana dan Tasman Hamami, "PENGEMBANGAN KEGIATAN KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER," *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 8, No.1 (Mei 2020): 2.

belajar peserta didik. Rencana pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan sangat penting. Rencana ini harus mencakup tujuan pembelajaran untuk membantu pendidik membuat proses pembelajaran dan asesmen yang lebih komprehensif. Dalam cerita, pencapaian pembelajaran dijelaskan tentang rumusan kompetensi yang perlu ditingkatkan pada anak usia dini, baik secara keseluruhan maupun dalam setiap elemen atau domain kompetensi. Semua upaya untuk mencapai CP selalu disesuaikan dengan tahap perkembangan dan karakteristik anak. Ini memungkinkan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan berdampak positif pada perkembangan peserta didik. Dengan menggunakan pendekatan yang adaptif, diharapkan siswa dapat memaksimalkan potensi mereka dan mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan.[23]

3) Perangkat Kurikulum Merdeka

Banyak orang yang peduli dengan pendidikan tertarik dengan program yang diumumkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Dalam penelitian jurnal mereka, Baktiar Nasution dan rekannya berpendapat bahwa "belajar merdeka" berarti memiliki otonomi dan otoritas di bidang pendidikan. Memberikan kebebasan kepada sekolah, pendidik, dan siswa diharapkan akan menghasilkan ide-ide baru. Selain itu, siswa akan diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan kreatif. atau sering disebut sebagai diferensiasi pembelajaran, di mana keragaman siswa diakomodasi berdasarkan atribut mereka.[24]

4) Standar Kelulusan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka memperkenalkan paradigma baru dalam sistem pendidikan Indonesia dengan menekankan penguasaan kompetensi yang bersifat holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan penilaian, memberikan ruang bagi

[23] Yogi Anggraena, *Capaian Pembelajaran Fase Pondasi* (Badan Standar, kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024).

[24] Ahmad Zain Sarnoto, "Model Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka," *Jurnal on Education* 06, No. 03 (April 2024): 1.

siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Penilaian berbasis proyek, portofolio, dan evaluasi sikap memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemajuan mereka di berbagai bidang yang lebih luas, tidak hanya berdasarkan ujian tertulis.[25]

Kurikulum Merdeka adalah inovasi pendidikan baru di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada pendidik dan siswa dalam merencanakan pelajaran mereka. Penilaian, yang telah mengalami perubahan besar, adalah komponen penting dari Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menggunakan bentuk penilaian berikut:

a) Penilaian Formatif

Merupakan penilaian dimana seorang guru terus menerus menyampaikan kemajuan siswa selama pembelajaran. Ini mencakup diskusi kelas, proyek kecil, dan umpan balik secara reguler. Dalam kurikulum merdeka, Penilaian formatif sangat penting karena dapat membantu siswa memahami dan mengontrol proses belajar mereka sendiri.

b) Penilaian Sumatif

Merupakan jenis penilaian. Penilaian ini biasanya dilakukan ketika suatu periode pembelajaran telah berakhir. Penilaian sumatif masih sangat penting dalam kurikulum merdeka, tetapi itu tidak menjadi satu-satunya pengukuran keberhasilan siswa karena mempertimbangkan berbagai aspek kemajuan siswa.

c) Penilaian Proyek

Salah satu komponen Kurikulum Merdeka, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, memiliki evaluasi proyek. dimana siswa diberi tugas untuk menyelesaikan proyek atau karya yang menunjukkan pengetahuan mereka tentang materi. Lebih dari sekedar

[25] Helmi dkk., "STANDAR KELULUSAN DALAM KURIKULUM MERDEKA," *El-Idare: Jurnal Standar Kelulusan, Kurikulum Merdeka* vol.10 No.20 (2024): 4.

memberi nilai, penialian proyek memberi peserta didik kesempatan untuk menyampaikan gagasan mereka. [26].

5) Model Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka

Dalam Kurikulum Merdeka Belajar, model pembelajaran berdiferensiasi mengacu pada berbagai faktor, seperti keunikan individu, pencapaian belajar yang beragam, motivasi, konteks atau latar belakang siswa, minat serta kebutuhan siswa, proses normalisasi, penilaian, dan integrasi. Faktor pendukung lainnya meliputi ketersediaan perpustakaan dan sumber belajar yang memadai, jadwal pelajaran yang fleksibel, serta mekanisme penilaian.[27]

3. Kelebihan Serta Kekurangan Kurikulum 2013 (K13) Dan Kurikulum Merdeka

a. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan yang bersifat alami atau kontekstual, karena menitikberatkan pada karakteristik peserta didik dan bertujuan mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oleh karena itu, siswa memiliki peran aktif dalam proses pendidikan, yang berlangsung secara spontan dan tidak bersifat kaku atau terlalu terstruktur. Kurikulum ini, yang dikenal dengan sebutan K13, memiliki sejumlah keunggulan, antara lain:

1) K13 dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan.
2) Kurikulum juga memberikan tanggung jawab besar kepada guru dalam mempersiapkan siswa, sehingga sangat penting bagi para pendidik untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan program pendidikan guru.
3) Kurikulum ini menekankan kesetaraan, tanpa membedakan antara peserta didik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan

[26] Bustanul Arifin, "Bentuk Penilaian dalam Kurikulum Merdeka," *Kompasiana* (blog), 25 September 2023.

[27] Ahmad Zain Sarnoto, "Model Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka," *Journal on Education* Volume 06, No. 03 (t.t.): 9–10.

Namun demikian, Kurikulum 2013 (K13) juga memiliki sejumlah kelemahan, di antaranya:

1) Proses penilaian yang cukup kompleks dan sulit diterapkan secara merata.
2) Minimnya pelatihan serta sosialisasi yang memadai bagi tenaga pendidik.
3) Terbatasnya ketersediaan bahan ajar maupun referensi pendukung.
4) Asumsi pemerintah bahwa seluruh siswa dan guru memiliki kemampuan atau kapasitas yang setara, padahal kenyataan di lapangan bisa berbeda-beda.[28]

b. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga siswa dan lulusan dapat berhasil melalui masa depan yang menantang. Memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk berpikir secara mandiri adalah kunci dari kebebasan belajar. Kurikulum bebas memiliki beberapa keuntungan, seperti:

1) Siswa diberikan keleluasaan dalam menentukan materi pembelajaran yang paling relevan dengan kebutuhannya. Hal ini mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar serta membantu mengasah kemampuan dan keterampilan guna mencapai target kompetensi.
2) Kurikulum Merdeka memiliki struktur yang lebih ringkas karena pengembangan kompetensi peserta didik dirancang berdasarkan tahapan atau fase perkembangan tertentu.
3) Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka berlangsung secara lebih mendalam, menyenangkan, penuh makna, dan tidak tergesa-gesa.

Namun, setiap kriteria pasti memiliki kekurangan yang perlu dievaluasi. Berikut beberapa kelemahan Kurikulum Merdeka:

[28] Muh. Nana Supriatna, Istiqomah Eka Diyanti, dan Ratna Sari Dewi, "Analisis Perbandingan Kurikulim KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar," *Journal on Education* 6, No. 1 (Desember 2023): 9168.

1) Ketersediaan fasilitas dan perlengkapan sekolah yang terbatas Kondisi ini membuat lebih sulit bagi guru dan siswa untuk membuat proses pembelajaran yang lebih efisien, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi.
2) Dukungan orang tua yang masih diperlukan terkait Kurikulum Merdeka. Banyak orang tua peserta didik belum memahami sepenuhnya konsep dan cara kurikulum ini dijalankan.
3) Kurangnya pelatihan menyebabkan kesiapan guru yang buruk untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.
4) Sistem pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini.[29]

4. Perbandingan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka

Tabel 1. Aspek-aspek pada Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka

No	Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
1.	Kerangka Dasar	Rancangan Landasan utama Kurikulum 2013 adalah tujuan sistem Pendidikan Naional dan Standar Nasional Pendidikan	Rancangan Landasan utama Kurikulum Merdeka adalah tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan. Mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik.
2.	Kompetensi yang dituju	Kompetensi Dasar (KD) yang dikelompokkan pada empat Kompetensi Inti (KI), yaitu Sikap, Sosial, Pengetahuan dan Ketrampilan	Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan tiap fase perkembangan. Rumusannya disajikan dalam bentuk paragraf yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap,

[29] Shakila Riyani dkk., "Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri Gorowong 05 Parung Panjang," *Seminar Nasional dan Publikasi Ilmiah*, 2024, 9–14.

			dan keterampilan guna mencapai, memperkuat, serta meningkatkan kompetensi peserta didik.
3.	Pembelajaran	Kurikulum ini memiliki pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran	Menggunakan pendekatan diferensiasi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik
4.	Perangkat Kurikulum	Memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum, penilaian, dan pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan	Panduan dalam proses pembelajaran dan penilaian, penyusunan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan, perancangan proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta penerapan pendidikan yang bersifat inklusif.
5.	Penilaian	➢ aspek pengetahuan ➢ aspek keterampilan ➢ aspek sikap dan perilaku	Kedua kurikulum sama-sama menerapkan penilaian formatif yang hasilnya digunakan untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Namun, Kurikulum Merdeka memiliki penilaian khusus terhadap proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang merupakan komponen baru dan tidak ditemukan dalam Kurikulum 2013.

Sumber: Dokumen Kemendikbud 2022

D. Kesimpulan

Sejarah kurikulum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang sistem pendidikan nasional yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Pada masa penjajahan Belanda, kurikulum lebih bersifat kolonial dan terbatas pada kalangan tertentu, yakni untuk mencetak pegawai pemerintah. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya menyusun kurikulum yang sesuai dengan tujuan nasional untuk membangun karakter dan kecerdasan bangsa. Kurikulum pertama pasca-kemerdekaan adalah Kurikulum 1947, yang terus berkembang melalui berbagai revisi hingga pada tahun 2013, Indonesia menerapkan Kurikulum 2013 (K13) yang bertujuan untuk mencetak siswa yang kompeten dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Kurikulum 2013 (K13) membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia dengan menekankan pada pendekatan scientific dan integrasi berbagai mata pelajaran dalam satu tema. K13 mengedepankan pembelajaran berbasis kompetensi yang memfokuskan pada pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Namun, meskipun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan K13 menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksiapan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, dan pelatihan guru yang belum optimal. Hal ini menyebabkan implementasi K13 berjalan tidak merata dan menimbulkan beban yang berat bagi guru dan siswa.

Sebagai respons terhadap kelemahan yang ada pada K13, pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah dalam menentukan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengutamakan kemandirian belajar, dan pengembangan karakter. Selain itu, dalam Kurikulum Merdeka, terdapat pilihan untuk menjalani proses pembelajaran yang lebih personal melalui modul-modul yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat siswa.

Perbandingan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatannya. K13 lebih terstruktur dengan pencapaian kompetensi yang jelas dan terukur, sedangkan Kurikulum Merdeka lebih memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk mengembangkan potensi secara lebih fleksibel. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di Indonesia, Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Perbedaan ini mencerminkan dinamika perkembangan pendidikan di Indonesia yang terus berupaya untuk menyeimbangkan antara standar nasional dan kebutuhan lokal.

E. Referensi

A. Suradi, Cecen Andrea, Putri Ayu Cindika, Meli Amanda, Windi Eka, dan Lici Inda Anggraini. "KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM 2013 MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)." *AL IBTIDAIYAH: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* Volume 4 Nomor 1 (Januari 2023): 15–20.

Ahmad Suradi, Cecen Andrea, Putri Surya Anita, Indira Agleo Putri, Depi Fitriani, dan Intan Wulansari. "STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN KOMPETENSI INTI PADA KURIKULUM 2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH." *Awwaliyah: Jurnal PGMI* Volume 5 Nomor 2 (2020): 144.

Ahmad Zain Sarnoto. "Model Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka." *Jurnal on Education* 06, No. 03 (April 2024): 1.

———. "Model Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka." *Journal on Education* Volume 06, No. 03 (t.t.): 9–10.

Akhmad Yazidi. "MEMAHAMI MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DALAM KURIKULUM 2013 (THE UNDERSTANDING OF MODEL OF TEACHING IN CURRICULUM 2013)," t.t., 94.

Aulia Rofi'atul Khusna, Anis Sukmawati, dan Muhammad Nuril Huda. "ANALISIS PERBANDINGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM SUDUT PANDANG FILSAFAT PENDIDIKAN BARAT DAN ISLAM." *Annual Islamic Conference for Learning and Management*, Desember 2024, 136–37.

Azizah, Humaira Dzakiyya, Bihar Hadil Alam, dan Andia Nursyaban. "Sejarah Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Prasejarah Hingga Awal Kemerdekaan," t.t.

Bustanul Arifin. "Bentuk Penilaian dalam Kurikulum Merdeka." *Kompasiana* (blog), 25 September 2023.

Deni, Sri. "Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia" Vol: 1, No 1 (2023).

Dina, Farah. "SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA SAAT INI" Vol. VIII No.1 (2019).

Elis Setiawati, Sholeha. “PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945.” *jurnal Swarnadwipa* Volume 5, Nomor 3 (2019).

Fitri Wahyuni. “KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia)” Vol. 10 No. 2, (Juli 2015).

Helmi, Muhammad Ahir, Trisna Febriantika Anggreni, Didi Hardi Saputra, dan Sri Rahmi Fitriani Alam. “STANDAR KELULUSAN DALAM KURIKULUM MERDEKA.” *El-Idare: Jurnal Standar Kelulusan, Kurikulum Merdeka* vol.10 No.20 (2024): 4.

Ibadullah Malawi, Dewi Tryanasari, dan Edy Riyanto. “PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASA.” *ILMU PENDIDIKAN* 2, No.1 (Juni 2017): 2.

Khusna Farida Shilviana, dan Tasman Hamami. “PENGEMBANGAN KEGIATAN KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER.” *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 8, No.1 (Mei 2020): 2.

Marzelni, Desi. “Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia,” 2025.

Muh. Nana Supriatna, Istiqomah Eka Diyanti, dan Ratna Sari Dewi. “Analisis Perbandingan Kurikulim KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar.” *Journal on Education* 6, No. 1 (Desember 2023): 9168.

———. “Analisis Perbandingan Kurikulum KTSP, K13 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar.” *Journal on Education* Volume 06, No. 01 (Desember 2023): 9170.

Nora Karima Saffana, Muhammad Rifa’i Subhi. “Degradasi Moral Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam.” *Muaddib* 2, No.1 (Desember 2023): 67.

Nova Yunita Sari, Dearlina Sinaga, dan Juliper Nainggolan. “PERKEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA DI INDONESIA.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Volume 7 Nomor 1 (2024): 2199.

Pramudya, Handika Anggit, dan Afifah Aura Felisha. “PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA HINDU BUDHA” 3, no. 1 (2024).

Saifudin, Ahmad. “SEJARAH DAN PARADIGMA KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA” Vol. 02 Nomor 02 (2022).

Shakila Riyani, Putriyanti Aprilia Utami, Fairuz Zahira, dan Ocih. “Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri Gorowong 05 Parung Panjang.” *Seminar Nasional dan Publikasi Ilmiah*, 2024, 9–14.

Sultani, Zofrano Ibrahimsyah Magribi, dan Yasinta Putri Kristanti. "PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ZAMAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA ABAD 19-20." *Jurnal Artefak*, 2020.

Ummi Salamah, Yuni Listiyani, dan Mustafiyanti Mustafiyanti. "Analisis Konsep Dan Struktur Kurikulum Merdeka Dan Merdeka Belajar." *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* vol.4 No.2 (2024): 127–28.

Utami Kumala Dewi, David Triatna, dan Sukiman. "KOMPARASI PERANGKAT PEMBELAJARAN KURIKULUM (2013 DAN MERDEKA) ANAK USIA DINI." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 8 (2024): 55–59.

Yogi Anggraena. *Capaian Pembelajaran Fase Pondasi*. Badan Standar, kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.

Zakso, Amrazi. "IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI INDONESIA" Volume 13 Number 2 (2022).